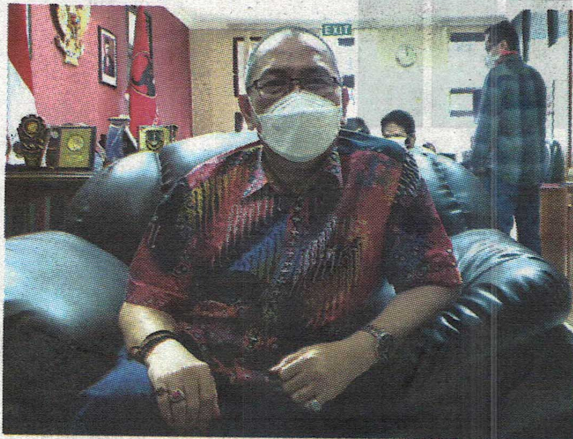




Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Kota Jogja Capai Rp 385 Miliar

Percepat Tangani Covid-19, Konsen di Empat Sektor Perubahan Anggaran



DPRD bersama Pemkot Jogja tengah melakukan upaya percepatan penanganan Covid-19. Langkah itu tercermin melalui penataan belanja. Tidak hanya di APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 Murni saja. Tapi juga dilakukan melalui perubahan anggaran.

"KAMI sepakat melakukan optimalisasi dalam rangka percepatan penanganan pandemi," ujar Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudiymoko di ruang kerjanya gedung dewan kota kemarin (30/8) ■

► Baca **Percepat...** Hal 3

Percepat Tangani Covid-19, Perubahan Anggaran Konsen di Empat Sektor

Sambungan dari hal 1

Ada empat sektor yang menjadi konsentrasi. Yakni belanja di sektor kesehatan, daya dukung sektor pariwisata dan jaring pengaman sosial (JPS) sebagai dampak turunan dari Covid-19. Semua hal itu, terang Danang, telah diakomodasi dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA/PPAS) APBD Perubahan TA 2021 Kota Jogja.

Setelah tiga sektor itu ditambah satu sektor lagi. Yakni sektor pelaksanaan pendidikan secara daring pada sisa semester kedua 2021. Adapun sektor infrastruktur masuk dalam prioritas dan target kesekian. "Fokus kami pada bidang kesehatan. Khususnya ketercukupan dan kecepatan vaksinasi bagi warga Kota Jogja," jelas Danang.

Danang optimistis dengan politik anggaran seperti itu bakal mendorong bangkitnya ekonomi Kota Jogja. Kembali sektor kesehatan, Danang mengaku alokasi anggaran masih bergerak. Ada kemungkinan tambah kurang hingga mencapai Rp 107 miliar.

Dikatakan, berdasarkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) TA 2020 yang telah di-

audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai Rp 385 miliar. Sedangkan SILPA tahun berjalan menembus angka Rp 134 miliar. "Masih anggaran sebesar Rp 242 miliar yang belum dimanfaatkan," kata ketua dewan.

Setelah ada kesepakatan dan persetujuan bersama wali kota, dewan saat ini tengah menghitung perangkaan anggaran perubahan. Komisi-komisi dan badan anggaran tengah mencermati rencana kerja anggaran (RKA) APBD Perubahan TA 2021. Rencananya paripurna pengesahan RAPBD Perubahan diagenda berlangsung pada minggu bulan depan. "Antara tanggal 13 dan 14 September," lanjut dia.

Soal pertimbangan politik anggaran, Danang merujuk pada sejumlah hal. Mulai kebijakan pemerintah pusat, SILPA 2020 dan asumsi pendapatan semester pertama 2021. Dari perhitungan dewan asumsi pendapatan masih minus. Adapun defisit TA 2021 yang disepakati mencapai 143 miliar. Sedangkan akumulasi sampai dengan akhir tahun anggaran angka defisitnya mencapai Rp 95 miliar.

Danang meyakini dalam politik anggaran adanya defisit tidak ada masalah. Justru tanpa adanya defisit berarti tidak ada

anggaran pembangunan. Hanya saja persentase defisit tidak boleh lebih tinggi dari 4,3 persen. Ini dengan perhitungan angka pertumbuhan mencapai 5,5 persen. "Kalau inflasi kita 4,6 persen, maka pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi," terang ketua badan anggaran DPRD Kota Jogja ini.

Kembali soal penanganan Covid-19, Danang mewanti-wanti semua jajaran di Pemkot Jogja tidak lagi terlena. Awal 2021 semua merasa aman. Namun memasuki pertengahan tahun terjadi ledakan. Juli 2021 ada gelombang Covid-19. Dalam keadaan tidak siap, pemerintah daerah tak siap menyediakan shelter, oksigen dan *bed occupancy rate* (BOR). Dampaknya risiko *fatality* atau angka kefatalan pasien Covid-19 yang meninggal relatif tinggi.

"Kejadian Juli lalu jangan sampai terulang. Dari sekarang harus kita siapkan. Khususnya kesiapan belanja segala hal yang dibutuhkan," pintanya.

Dari berbagai referensi, upaya mengantisipasi terjadinya angka kefatalan itu dengan vaksinasi. Sebanyak 90 persen kefatalan terjadi karena pasien yang terkonfirmasi Covid-19 belum divaksin. Karena itu dalam APBD Perubahan TA 2021, dewan men-

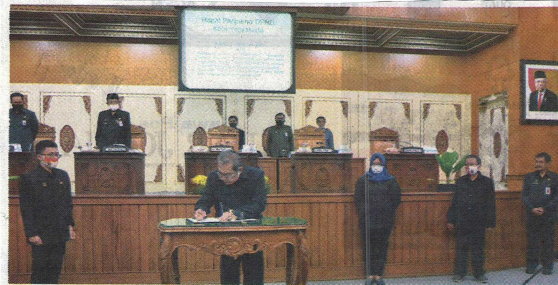
dorong ketersediaan vaksin.

"Akhir tahun ini 70 persen warga Kota Jogja harus sudah divaksin," desak politikus yang tinggal di daerah Babaran, Umbulharjo, Jogja ini.

Jumlah penduduk Kota Jogja sekitar 420 ribu jiwa. Jika perhitungannya 70 persen harus divaksin, maka setidaknya 350 ribu orang harus divaksin. "Sekarang baru mencapai 156 ribu. Kita kejar sampai akhir tahun. Kita gasnya dengan nada optimistis.

Terkait dorongan bangkitnya sektor ekonomi, dewan meminta kegiatan promosi pariwisata ke berbagai daerah diintensifkan. Subsidi bagi pengikat pariwisata diberikan. Tak terbatas untuk hotel. Menggerakkan sektor pariwisata dibutuhkan daya ungkit. "Jasa pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi Jogja," tuturnya.

Menciptakan pariwisata yang aman, pelaku jasa pariwisata dan wisatawan yang datang harus benar-benar sudah divaksin. Dengan demikian mereka yang datang ke Jogja dipastikan tidak membawa virus korona. "Langkah antisipasi yang ketat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan harus dilakukan," kata mantan ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogja ini. (kus/fj)



BERGERAK CEPAT: Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudyatmoko menandatangani keputusan dewan disaksikan wali kota, wakil wali kota dan dua wakil ketua dewan lainnya.

FOTO: FOTO: ISTIMENIA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
3. Badan Perencanaan Pembangunan			
4. BPKAD			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005